

Spiral Siklus Menuju Indonesia Emas 2045


Sintesis kerangka Fukuyama (Institusi) · Huntington (Identitas) · Chomsky (Kontrol Informasi)

Evolusi spektrum politik

- 
1999 **Pluralisme ideologis**
Pemilu berlandaskan ideologi murni
- 
2009 **Sentralisme personal**
Pragmatisme & ketokohan figur
- 
2014–2019 **Bipolaritas identitas**
Masyarakat terbelah oleh SARA
- 
2024 **Kartelisasi pragmatis**
Ideologi mati, tanpa oposisi murni

Mutasi Propaganda (Chomsky 20)

Orde Baru 2024



TVRI/RR1 & pemberedelan → buzzer, cyber army, algoritma AI, UU ITE

Model analisis



Proyeksi skenario 2045

- 1 Status quo**
Konsolidasi oligarkis dilembagakan. Inovasi mandek, Visi 2045 gagal.
 
- 2 Kolaps**
Jika kartel runtuh tanpa institusi penyalur, konflik identitas meledak.
 
- 3 Jalan keluar ✓**
Reinstitusionalisasi demokrasi. Setia pada mandat Reformasi 1998.
 

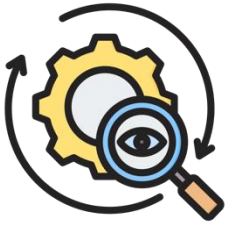


ADA JALAN KELUAR DARI PARADOKS INI: TIGA TITIK KRITIS REFORMASI

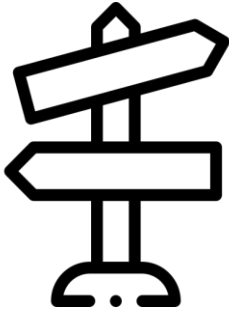
Di Ambang Persimpangan: Meniti Jalan Terjal Media Massa Menuju Kebebasan

Sejak masa Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka, **lanskap media menjadi arena tarik-menarik kuasa**. Tempat kekuasaan terus berganti rupa, dipertarungkan, dan dinegosiasikan. Negara menunjukkan watak kekuasaan yang **cair** tetapi terus-menerus **dilanggengkan**. Sementara itu, partisan menjelma norma media. **Partisan**, dalam konteks ini, bukan sekadar **afiliasi formal**, melainkan **praktik yang melekat** dalam relasi kuasa sehari-hari.

INTI ARGUMENTASI



Anjing Penjaga
(*Watchdog*)



Media massa dalam jebakan kekuasaan,
selalu berada di persimpangan jalan.



Mitra
Kekuasaan

TRAJEKTORI HISTORIS



Kolonial

*Haatzaai Artikelen,
Persbreidel Ordonantie,
Pembungkaman pers
kritis bumiputra*



Orde Lama

Alat Revolusi,
Afiliasi partai
dan Pantja-Tunggal,
Pemberedelan



Orde Baru

Rezim Perizinan
(SIT, SIC, & SIUPP),
Kontrol Institusi,
Pers Pancasila,
kill the messenger



Pasca-Reformasi

Deregulasi dan Demokratisasi,
Jembatan Pembentukan
Oligarki, Teknologi:
Hegemoni dan Resistensi

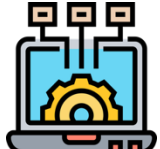
Tiga Ranah Intervensi



Politik



Ekonomi



Teknologi

*World Press Freedom Index
Indonesia 2025* **terburuk**
dalam 13 tahun terakhir, di
bawah rata-rata dunia,
peringkat 127/180 negara.



PROAKTIF BUKAN REPRESIF

REGULASI

Revisi regulasi represif, batasi afiliasi politik pemilik; bendung RUU problematik.



KELEMBAGAAN

Perkuat lembaga pers dan penyiaran sebagai entitas independen.



SUMBER DAYA

Pengembangan kapasitas jurnalis, dukung stabilitas media alternatif.



LITERASI PUBLIK

Dorong literasi publik sebagai fondasi ekosistem pers demokratis.



OTONOMI KHUSUS PAPUA: DILEMA TATA KELOLA, IDENTITAS, DAN PROYEKSI KELANJUTAN

AKAR KUTUKAN



Kutukan Sumber Daya



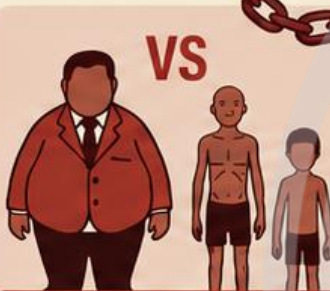
Kekerasan Epistemik

Daerah Otonomi Baru

↳ *Devide et Impera*

Dilema Sejarah

Integrasi Paksa



Elite Capture

Pembangunan sebagai Kebebasan

Eronoseli

De Jure vs De Facto

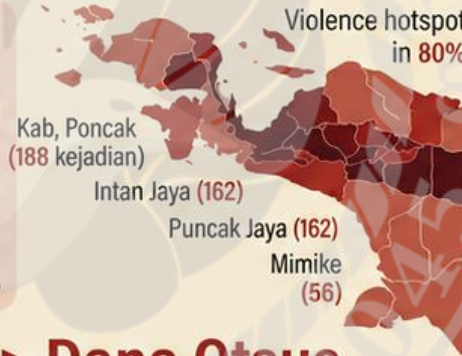
ANGKA = FAKTA

Rp128 Triliun
Dana Otsus terserap → 4,25%

kemandirian fissan hanya

37%
ekonomi Papua = tambang

↳ Puncaknya → 53,87%



Demokrasi > Dana Otsus
untuk meningkatkan kesejahteraan

Skor demokrasi 'Jaminan Kebebasan' Menyentuh Nol



JALAN KELUAR

Ubah Paradigma:

Tinggalkan sekuritisasi → adopsi *Development as Freedom*

Pemerintah Pusat:

Bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) independen dan non-militer

Pemerintah Daerah:

Audit Dana Otsus secara ketat, perkuat MRP dengan kewenangan nyata

Masyarakat Sipil:

Geser dan 'politik bendera' → 'politik kesejahteraan'

Kompromi Besar:

Otsus Jilid II – demiliterisasi sejati + pemulinan martabat politik OAP

Keadilan adalah *Conditio Sine Qua Non* bagi Perdamaian.

MENJAGA NYALA HARAPAN: GENERASI Z DAN UJIAN DEMOKRASI

Penulis: Baginda Muda Bangsa dan Jessica Arreta

Generasi Z adalah penentu arah demokrasi Indonesia menuju tahun 2045. Untuk itu, diperlukan konsolidasi basis generasi muda untuk menguatkan energi prodemokrasi yang berkelanjutan.

Signifikansi Gen Z



Merupakan kelompok demografi terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 27% dari populasi. Kelompok ini dikenal sebagai *digital native*.



Ketimpangan antara asa dan realitas di lapangan dapat memantik lahirnya *generation unit* yang menjadi kesadaran kolektif untuk memperjuangkan perubahan.

Paradoks Demokrasi Gen Z

Hasil survei Katadata dan IDN Research Institute menunjukkan..

52% tertarik terhadap isu politik

48% menilai politik Indonesia buruk

Meski begitu mereka tetap sepakat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik, meski saat ini di Indonesia masih tidak ideal.



Pada era sekarang, ada perpindahan dari *collective action* menuju *connective action*. Lebih likuid untuk memobilisasi suatu pergerakan, tetapi sulit untuk mempertahankan perubahan struktural yang bertahan.

Sayangnya mereka tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi generasi prodemokrasi

-  20% anak muda tercatat sebagai *Not in Education, Employment, or Training (NEET)*
-  Persaingan ketat pasar kerja formal meningkatkan porsi sektor informal dan *underemployment*
-  Upah rata-rata di bawah standar biaya hidup terendah Indonesia
-  Otomasi dan AI memperparah kerentanan bagi Indonesia yang tengah menghadapi isu kompetensi SDM

Memperkuat Daya Ungkit Mobilitas Sosial-Ekonomi daripada Gen Z: Agenda Reformasi Struktural

- 1**
Percepatan **Industrialisasi** melalui Keterbukaan Ekonomi dan Deregulasi Industri
- 2**
Penguatan **UKM** ke dalam **Strategi Industri** yang Inklusif
- 3**
Reformasi Pendidikan Vokasi berorientasi Kebutuhan Pasar Kerja
- 4**
Perbaiki **Kurikulum** dengan Integrasi **Pendidikan Demokrasi**

Demokrasi yang Gagal Menyembuhkan: Potret Kematian Ibu di Indonesia

Paradoks Demokrasi

Otonomi yang Dinegosiasikan

Ilusi Prosedural

Realitas Substansial

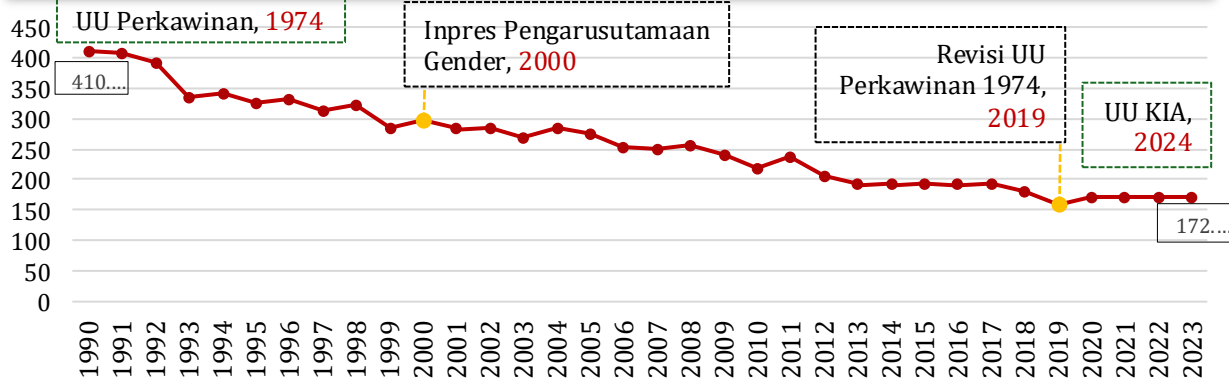
Peringkat *Democracy Index* Tahun 2024

59

Peringkat *Gender Inequality Index* Tahun 2023

108

Rasio Kematian Ibu di Indonesia
(kematian per 100.000 kelahiran hidup)



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari *United Nations Development Programme*.

Konstruksi Sosial
(UU Perkawinan Tahun 1974)
Suami sebagai kepala keluarga;
Kerja perawatan tak berbayar
jatuh ke **pundak perempuan**

Birokrasi Medis
(Permenkes
Nomor 290 Tahun
2008)
Informed consent
dinegosiasikan

Feminization of Responsibility
Memikul beban penuh atas keluarga, tetapi tidak memiliki kuasa penuh atas tubuhnya sendiri

Hukum Kriminalisasi
(KUHP Baru)
Akses **aborsi aman** sangat dibatasi;
Mengikis hak reproduksi aman

Kesehatan perempuan adalah cermin paling jujur dari mutu demokrasi. Cermin akan retak tanpa terelakkan saat keputusan atas tubuh dinegosiasikan, biaya sosial ditumpuk kepada pundak ibu, serta biaya penanganan dan perlindungan tidak menjadi yang utama.

Interaksi Otoritas Fiskal Dan Moneter: Perspektif Ekonomi Politik – Makmur Keliat dan Pasha Nur Fauzan

Tulisan ini mengkaji hubungan antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengelola kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Perbedaan fokus dan karakter antara keduanya kerap menimbulkan ketegangan yang dimediasi dengan instrumen teknokratis seperti batas defisit, batas utang, dan target inflasi. Kerangka tersebut dikritik karena dapat menutupi masalah struktural dan mendorong finansialisasi negara. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini bergerak dari dominasi fiskal ke independensi moneter hingga kembali menunjukkan penguatan dominasi fiskal.

NEGARA SEBAGAI WELFARE PROVIDER



TIGA POLA INTERAKSI FISKAL-MONETER



TIGA POLA INTERAKSI FISKAL-MONETER



01

Pengaruh Politik

- Pola fiskal moneter selalu mengikuti arah kekuasaan.
- Kebijakan teknokratis tidak bisa lepas dari dinamika politik negara.

02

Ilusi Independensi

- Independensi De Jure belum tentu terjadi De Facto.
- Krisis dan tekanan politik selalu menentukan batas nyata independensi.

03

Batas Stabilitas Makro

- Stabilitas makro tidak otomatis menyelesaikan masalah struktural.
- Kemiskinan dan ketimpangan memerlukan regulasi efektif di luar moneter-fiskal.

Utang Indonesia: Aman di Permukaan, Rapuh di Dalam

Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas legal 60%, indikator keberlanjutan utang lainnya menunjukkan tanda bahaya dan ketidakadilan antargenerasi.



Paradoks Kondisi Utang Indonesia

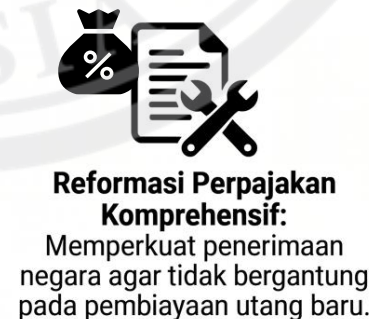


Beban Struktural & Masalah Intergenerasional



Indikator	Kondisi Riil	Standar Aman	Status
Rasio Utang/PDB	40,1% ~ 2025	< 60%	Aman ✓
Keseimbangan Primer	Negatif Sejak 2012	Positif (Surplus)	Rapuh ✗
Bunga Utang/Pendapatan	19% ~ APBN 2026	7% - 10%	Rapuh ✗
Debt Service to Revenue Ratio (DSR)	45% ~ 2025	25% - 35%	Rapuh ✗

Rekomendasi Kebijakan

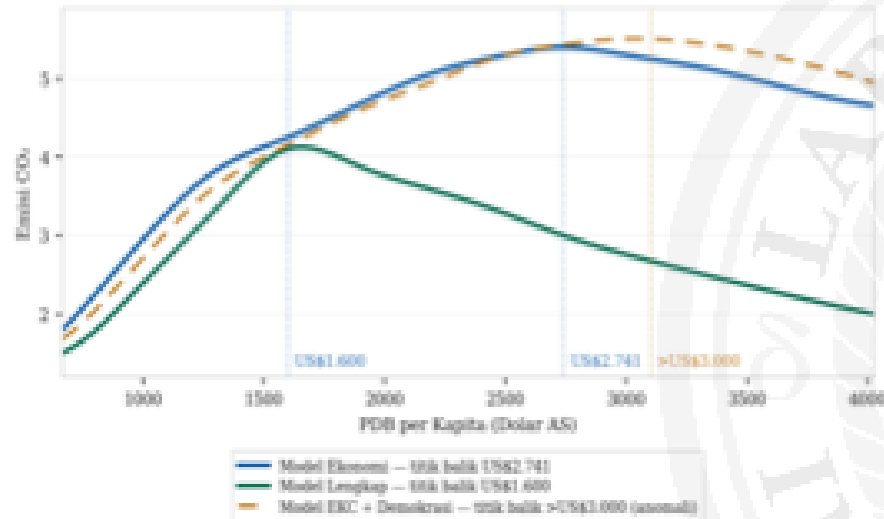


Demokrasi yang (Tak Otomatis) Hijau

Radhityana Muhammad & Indah Lestari Saani

Environmental Kuznets Curve (EKC)

Model lengkap menunjukkan *turning point* lebih cepat, namun pengaruh demokrasi sangat kecil



Anomali demokrasi

Masuknya variabel demokrasi justru menunda titik balik ke >US\$3.000. Demokrasi belum mampu menjadi katalis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kontribusi demokrasi kecil

Pada Model Lengkap yang memberikan titik balik lebih cepat, koefisien demokrasi hanya 0,005 - 0,006. Sementara koefisien energi, hutan, dan pertumbuhan ekonomi jauh lebih dominan sebagai penentu emisi.

Kondisi Internasional

Kemunduran nyata dalam agenda pembangunan berkelanjutan global

Retorika transisi hijau tidak sejalan dengan realitas data energi dan komitmen negara-negara utama

45.850 TWh

Konsumsi batu bara global 2024, melampaui puncak 2014 (44.912 TWh)

AS mundur dari Perjanjian Paris

Jan 2025. 'Drill, baby, drill', dan hilang ~10% pendanaan iklim global

Tiongkok: 17 unit PLTU di Indonesia

Pemimpin transisi hijau justru mendanai PLTU batu bara, bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam negerinya

Target COP29 (2035)

US\$300M/th

Kebutuhan adaptasi nyata

US\$387M/th

Kondisi global yang berubah menciptakan ruang gerak yang semakin sempit bagi Indonesia untuk memilih jalur pembangunan berkelanjutan.

Scenario Building 2045

Kuadran demokrasi dan lingkungan hidup



Periode 1999-2012, demokrasi Indonesia sudah berada pada posisi yang lebih baik. Hingga tahun 2025, kondisi lingkungan pun kian membaik, hingga regresi demokrasi yang terjadi mengancam capaian Indonesia ke kuadran ideal. Tanpa langkah perbaikan optimal, pada 2026-2030 Indonesia dikhawatirkan justru akan menuju ke skenario Otoritarianisme Ekstraktif, ditandai dengan regresi demokrasi ekstrim diiringi oleh berbagai program strategis seperti hilirisasi nikel, food estate, dan bioethanol yang mengabaikan kelestarian alam.

Ancaman Operasi Informasi dan Kegamangan Respons Indonesia

Penulis: Christian Guntur Lebang dan Winda Safitri

DEFINISI & RESPONS GLOBAL

RAND Corporation mendefinisikan operasi informasi sebagai upaya memperoleh keunggulan kompetitif melalui penyebaran propaganda, berakar dari praktik era Perang Dingin.

Jembatan Ranah Teknis dan Kognitif

Menghubungkan aspek siber/elektromagnetik dengan pembentukan persepsi publik dan legitimasi politik.



Fondasi Perang Hibrida & Zona Abu-abu
Menjadi komponen utama dalam strategi militer modern yang tidak terbatas pada konflik fisik terbuka.



Posisi Indonesia

Kecenderungan persepsi defensif seperti Rusia-Tiongkok; kaburnya batasan antara ancaman pertahanan dan pembungkaman kritik.

KEBIJAKAN INDONESIA



UU ITE — regulasi yang ada justru mengkonfirmasi ekspresi sipil, bukan melindungi dari operasi informasi asing

PEMBELAJARAN & REKOMENDASI

Australia

FITS Act dan Espionage & PI Act (2018)

Penegakan hukum & kontra-intelijen sipil terdepan

Singapura

POFMA (2019) dan FICA (2021)

Mengatur hostile information campaign dan politically significant persons

Taiwan

Anti-Infiltration Act (2020)

Institusi sipil terdepan; kolaborasi aktif dengan masyarakat sipil

Vietnam

Cybersecurity Law (2018)

Peringatan: sensor konten terlalu luas, risiko kebebasan sipil



Bentuk Regulasi
Terkait Operasi
Informasi



Perkuat
Kontrol Sipil
dan
Kolaborasi



Berhenti
Mendemonisasi
Kritik Publik

MENAKAR ARAH PERTAHANAN INDONESIA PADA ERA PRABOWO SUBIANTO

Modernisasi alutsista: kebutuhan strategis atau simbolisme politik?

PERGESERAN OPERASIONAL

Inward-Looking
Stabilitas Berbasis
Darat berdasarkan
Perang Total

**Penangkalan
Multi-Domain
Eksternal**

GELOMBANG MODERNISASI ALUTSISTA



Domain Udara:
42 Rafale, 24 F-15EX,
S-70 Black Hawk



Domain Laut:
2 Fregat PPA
Arrowhead 140,
2 Scorpène



Domain Darat:
Rudal Balistik KHAN,
Kendaraan Taktis
Maung MV3

TANTANGAN

01 Fragmentasi Doktrin

- 5 doktrin TNI tak sinkron (Haneg, Tridek, AD, AL, AU)
- Berorientasi pada perang berlarut, belum mengakomodasi *gray-zone operations*, dan tidak eksplisit mencantumkan ancaman

02 Keterbatasan Fiskal

- Anggaran pertahanan meski ambisius masih belum 1,5% PDB
- Bersaing langsung dengan program-program unggulan lain seperti MBG, Koperasi Merah Putih, 3 Juta Rumah, dll.
- Alokasi dan fungsi tidak transparan

03 Platform-based

- Ketiadaan dokumen strategis yang transparan untuk publik
- Risiko ketergantungan teknologi, serta memperburuk interoperabilitas sistem maupun kebutuhan suku cadang
- Ekspansi struktur teritorial darat: 750 Yon TP baru

SOLUSI STRATEGIS

Berbasis Platform (saat ini)	Berbasis Kapabilitas A2/AD (ideal)
Didorong oleh simbolisme politik	Berakar pada strategi Anti-Akses dan Penangkalan Wilayah (A2/AD)
Akuisisi <i>multi-domain</i> yang tidak terpadu	Memanfaatkan keunggulan geografis dan maritim
Mengabaikan beban pemeliharaan jangka panjang	Mencapai penangkalan yang kredibel tanpa memerlukan superioritas militer mutlak

Pendukung Institusional:

Untuk memastikan keberlanjutan, strategi A2/AD harus diintegrasikan dengan badan yang baru dibentuk, yaitu **Baharwathan** (Pemeliharaan) dan **Baloghan** (Logistik), guna mengelola biaya siklus hidup alutsista dan realitas fiskal secara ketat.

*"The beauty of a commander is to think.
Tugas pemimpin adalah untuk berpikir."
- Prabowo Subianto*

15 Tahun Undang-Undang Intelijen Negara

UU No. 17/2011 · Evaluasi 2011–2026

Setelah 15 tahun, UU Intelijen membutuhkan revisi struktural. Peristiwa Agustus 2025 dan Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis menegaskan bahwa kegagalan intelijen di Indonesia bukan sekadar teknis-operasional, melainkan akibat tiga problem fundamental: Masalah Koordinasi Intelijen, pengawasan yang tidak transparan, dan ketiadaan aturan akses dokumen rahasia.

TIGA PROBLEM FUNDAMENTAL

01 Koordinasi Belum Selesai

BIN merangkap koordinator & operator (Pasal 38). Ego sektoral dengan Bais TNI dan Baintelkam Polri membuat data tumpang-tindih dan deteksi dini gagal

02 Pengawasan yang Tidak Transparan

Pengawasan Komisi I DPR (Pasal 43) bersifat “pengawasan buta” – temuan, metodologi, dan tolok ukur tidak pernah diumumkan ke publik.

03 Retensi Dokumen Tertutup Permanen

UU 17/2011 mengatur retensi 25 tahun (Pasal 25) tanpa mekanisme deklasifikasi wajib. Konflik dengan UU KIP & UU Kearsipan

TIGA REKOMENDASI

01 Restrukturisasi Koordinasi

Hapus dualitas BIN. Reposisi BIN sebagai operator murni. Bentuk Dewan Koordinator Intelijen non-operasional di bawah Presiden – meneladani ODNI (AS) atau JIC (Inggris).

02 Penguatan Komite & Pengawasan

Komite hibrida: parlemen + profesional independen. Pengawasan investigatif aktif saat kegagalan fatal. Wajib publikasi laporan tahunan terdeklarasi – meneladani SSCI/HPSCI (AS) & ISC (Inggris).

03 Akses Publik & Mandatory Declassification

Amandemen UU dengan aturan Mandatory Declassification Review. Bentuk Komite Akses Independen (BIN, ANRI, akademisi). Sediakan panduan resmi akses dokumen tersanitasi – meneladani FOIA (AS).

“

Intelijen terbaik bukan berada di balik kantor yang penuh kerahasiaan, melainkan di kepala warga yang terdidik.